

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekembangan politik kekerabatan di Indonesia pada masa demokrasi elektoral pada saat ini sungguh merupakan suatu kecenderungan yang perlu diperlambat bahkan jika mungkin diakhiri. Hal ini sangatlah tentu tidak lepas dari banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu, karena sulitnya kritik, pengawasan, maupun mekanisme *checks and balances* untuk dapat berjalan. Dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka *playing field* juga akan semakin timpang karena politik kekerabatan sudah dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi tertentu akan lebih mungkin memenangkan kontestasi politik, dibandingkan calon lain yang sumber dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan.

Menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari terjadinya pemburukan institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistis, maka peran parpol menjadi semakin berkurang, dan kekuatan individu para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang tentunya menarik bagi partai politik untuk memenangkan posisi-posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat. Parpol tampaknya lebih mementingkan kemenangan, dan kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga abnormali maupun absurditas dukungan politik

pun seringkali diambil oleh parpol-parpol besar demi terjaminnya kemenangan dalam Pilkada.

Dinasti Politik menurut pengertian Leo Agustino adalah suatu “kerajaan politik” dimana elit menempatkan keluarganya, saudaranya, dan kerabatnya di beberapa pos penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional,¹ atau bisa dikatakan, elit membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan dinasti politik. Karena memang setiap warga negara, siapapun itu baik anak presiden maupun anak petani memiliki hak yang sama untuk memilih ataupun dipilih dalam berpolitik, melakukan atau tidak melakukan dinasti politik. Akan tetapi ini masalah kekuasaan serta kewenangan.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti mengenai rekrutmen politik Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan dan fokus terhadap Partai Golkar: *Pertama* fenomena demokrasi dan perpolitikan di Sulawesi Selatan memang tidak terlepas dari budaya-budaya dan relasi sosial yang lebih dulu hadir di kalangan orang Bugis dan Makassar. Seperti yang dituliskan dalam penelitian Dr.Titin Purwaningsih yang menyatakan bahwa dilihat dari aspek historis memang wilayah Sulawesi Selatan merupakan bekas wilayah kerajaan Gowa-Tallo, Bone, Wajo dan Soppeng yang tidak terlepas dari hubungan Patroklien yang sampai saat ini masih berkembang². *Kedua* berdasarkan data yang didapatkan jelas bahwa yang menguasai panggung politik di Sulawesi Selatan sebagian besar dari etnis Bugis-Makassar. *Ketiga* berdasarkan bukti yang ada memang banyak partai yang melakukan dinasti politik namun, seperti yang diungkapkan pengamat politik Ray pengusung politik dinasti lebih banyak dilakukakan oleh dua Partai

¹ Agustino , Leo.. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm, 83.

² Dr.Titin Purwaningsih, *Politik Kekerabatan dalam Politik Lokal di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009)*, Universitas Indonesia, hlm,3.

terbesar di Tanah Air yaitu Golkar dan PDI Perjuangan. Sementara Golkar adalah pengusung praktik Politik Dinasti paling tinggi, dari dua ini paling banyak Golkar seperti di Banten, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan (pojoksulsel.com, 2016).

Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. *Schattschneider* menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik³. Di Sulawesi Selatan, Golkar merupakan partai yang hegemonik dengan kader-kader dari birokrasi dan militer yang cukup kuat. Jika diperhatikan partai Golkar memang sudah eksis dari tahun 1971 sampai sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, Golkar menjadi terpecah akibat adanya pandangan yang berbeda sehingga mengembangkan paradigma baru baik itu secara struktur atau kelembagaan dan aspek kesinambungan agar tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekarya. Pembaruan tersebut dimaksudkan agar dapat meluruskan sejumlah kekeliruan lama, dan juga mengarahkan Partai Golkar yang mandiri, kuat, solid, berakar dan responsif. Dengan paradigma baru tersebut maka Partai Golkar diharapkan menjadi partai politik yang moderen dalam pengertiannya yang sebenarnya yaitu tidak lagi sebagai “partainya penguasa” (*the ruler’s party*) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama. Namun, secara fakta di Sulawesi Selatan Partai Golkar masih menjadi partai penguasa. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kepala daerah dan anggota Legislatif dari Partai Golkar pada tahun 2009-2014:

Tabel 1.1 Fenomena Kerabat Politik Partai Golkar di Sulawesi Selatan Periode 2009-2014

No	Nama	Keterangan
1.	Haris Yasin Limpo (2009-	Saudar dari Gubernur Sulawesi Selatan

³ Pamungkas, Teori Partai Politik 2, Pondok Kanal, 2011.

	2014) Partai Golkar DPRD Sul-Sel	Syahrul Yasin Limpo.
2.	Rafika Said (2009-2014) Partai Golkar DPRD Luwu Utara	Istri Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi
3.	Andi Fauziah Pujiwati (2009-2014) Golkar DPRRI	Anak Bupati Luwu Timur H.Andi Marakarma
4.	Sofyan Syam SE (2009- 2014) Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan	Putra Bupati Pangkep Syamsuddin A.Hamid
5.	Fakhruddin Rangga (2009- 2014) Golkar DPRD Sulawesi Selatan	Adik Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin
6.	Emilia Yolanda Mulyadi (2009-2014) Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan	Putri Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu
7.	Muh. Irsan Idris (2009-2014) Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan	Anak Bupati Bone Andi Idris Saliso
8.	Imran Tenri Tatta (2009- 2014) Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan	Anak Mantan Gubernur Selatan Amin Syam
.	Natsir Ibrahim (2009-2014) Partai Golkar DPRD	Anak Mantan Bupati Takalar Ibrahim Rewa

	Sulawesi Selatan	
--	------------------	--

Sumber: Titi Purwaningsih, 2015⁴.

Pada pelaksanaan pemilu 2014, partai politik bukan hanya dituntut untuk menjadi partai pemenang pemilu, namun lebih dari itu partai politik harus mampu menempatkan kader-kader yang benar-benar mampu dan memiliki akseptabilitas, kredibilitas, akuntabilitas dan kualitas bakal calon sebagai indikator utama dalam rangka untuk popularitas partai dimasyarakat. Namun, yang terjadi ketika Pemilihan Anggota Legislatif di DPR-RI seperti yang dijelaskan didalam artikel Republika.co.id bahwa di DPR terdapat 13,8% (77 orang dari 560) teridentifikasi memiliki jaringan kekerabatan dengan elite politik. dari jumlah tersebut ada 53% laki-laki (41 orang) dan 47% perempuan (36 orang)⁵. Dalam penetapan pemenang pada pemilihan Legislatif 2014-2019 Provinsi Sulawesi Selatan ternyata memperoleh 5 besar suara tertinggi dan Partai Golkar masih mendominasi. Berikut adalah data hasil pemenang pemilihan Legislatif 2014-2019 Provinsi Sulawesi Selatan Partai Golkar:

Tabel 1.2 Data Pemenang Pemilihan Legislatif Partai Golkar Tahun 2014-2019

No.	Nama	Keterangan
1.	Drs.H.A.M Yagkin Padjalangi,Apt, M.Kes (Golkar Periode 2014-2019)	Saudara Bupati Bone Andi Fahsar Padjalangi
2.	Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, SH, M.Si (Golkar Periode 2014-2019)	Saudara Gubernur Sul-Sel Sahrul Yasin Limpo
3.	Fahruddin Rangga, SE,M.Si (Golkar Periode 2014-2019)	Saudara Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin

⁴ Purwaningsih, Titin, 2015, Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009), diakses melalui [http: repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id), pada tanggal 12 November 2017, Pukul 20.30 WIB.

⁵ Republika.co.id, Dominasi Kekerabatan Politik, 2014.

4.	H.Sofyan Syam, SE (Golkar Periode 2014-2019)	Putra Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid
5.	Andi Mirza Riogi Idris, SE (Golkar Periode 2014-2019)	Putra Bupati Barru Idris Syukur
6.	Muhammad Rizha (Golkar Periode 2014-2019)	Putra Bupati Luwu Utara Arifin Junaedi

*Sumber : KPUD Prov,Sulsel

Dari data yang tertera diatas timbul banyak anggapan yang mungkin akan melibatkan atau menyalahkan partai politik, yang dilihat dari segi rekrutmennya dan ada juga yang mendukung adanya dinasti politik selama dinasti tidak mengakibatkan adanya kerugian-kerugian daerah tersebut. Namun menurut Wasisto Raharjo mencoba menelisik gejala terbentuknya dinasti politik yang kian marak ditemukan di Indonesia. Menurutnya, setidaknya ditemukan dua temuan analisa yang menyebabkan dinasti politik, yang pertama: macetnya kaderisasi Partai Politik dan menjaring calon kepala daerah yang berkualitas sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong sanak keluarga untuk menjadi pejabat publik. Kedua: konteks masyarakat yang menjaga adanya status didaerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah yang menggunakan petahana⁶ (Kompas, 2013). Partai Golkar di Sulawesi Selatan pada pemilihan legislatif 2014 telah menghasilkan calon terpilih yang berasal dari keluarga jaringan politik kekerabatan. Bagaimana mekanisme internal Partai Golkar dalam rekrutmen politik menarik untuk diteliti karena banyaknya kritik terhadap partai yang selama ini dituduh diuntungkan dengan fenomena politik kekerabatan.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis dalam penelitian ini hendak mengangkat sebuah judul yaitu, **REKRUTMEN POLITIK DAN**

⁶ Kompas, *Kaderisasi Partai Politik dan menjaring Calon Kepala Daerah*, 2013

FENOMENA POLITIK KEKERABATAN DI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS REKRUITMEN POLITIK DPD TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014-2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam pemilihan Legislatif 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara rekrutmen partai politik dalam mencari kepala daerah di Sulawesi Selatan khususnya dirana Legislatif.
2. Untuk mengetahui Pandangan Partai Politik Golkar terhadap Fenomena Politik Kekerabatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Merangsang adanya penelitian-penelitian baru dalam bidang ini, sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan dari aspek partai politik dan dinasti politik.
- b. Menjawab fenomena-fenomena sosial dan politik yang ada.

- c. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam mendalami penulisan mengenai partai politik dan dinasti politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena mengingat masih terbatasnya hasil penelitian tentang hal tersebut.
- b. Sebagai syarat-syarat dalam memenuhi gelar sarjana ilmu pemerintahan.
- c. Untuk membantu para pelaku politik agar dapat memahami realitas politik di Sulawesi Selatan.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Titin Purwaningsih dengan judul *Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009)*. Dalam penelitian ini terdapat beberapa implikasi dari hasil penelitian ini. *Pertama*, hasil penelitian dari disertasi ini menunjukkan bahwa tidak semua politisi yang berasal dari keluarga Politik merupakan manifestasi dari politik kekerabatan. *Kedua*, pembatasan politik kekerabatan melalui undang-undang tidak akan efektif apabila tidak disertai pembenahan sistem rekrutmen politik dari Partai Politik. *Ketiga*, politik kekerabatan tidak hanya terjadi pada jabatan eksekutif namun juga pada jabatan Legislatif, sehingga pencegahan politik kekerabatan juga perlu dilakukan dalam Undang-Undang tentang rekrutmen anggota DPR, DPD dan DPRD dengan batasan makna politik kekerabatan yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nico Harjanto dengan judul *Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya kegagalan parpol dalam rekrutmen kepemimpinan memang tidak serta merta kesalahan parpol sendiri. Regulasi, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan rejim pemerintahan turut menyumbang bagi kemunduran fungsi penting parpol inL Selain itu, masyarakat yang sudah apatis dengan janji-janji muluk juga semakin terbuai dengan aksi-aksi *vote buying* karena hanya pada saat pemilu kada berlangsung pernilih dapat mendapatkan sesuatu secara langsung dari para kandidat yang bertarung. Sebab seperti biasanya, setelah pemilu kada usai dan pemenang ditetapkan, banyak dari Gubernur, Bupati, maupun Walikota melupakan janji-janjinya, dan lebih sibuk mengurus kepentingannya untuk mengembalikan modal dan pinjaman yang dipakainya guna memenangkan pemilu kada yang sangat mahal.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sari, Armin Arsyad, Gustiana A. Kambo (2013) dengan judul *Konflik Tiga Elite Penentu Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2013*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Polarisasi hadir ketika terjadi perebutan kekuasaan antar elit. Polarisasi mengarah pada dua ranah arena kekuasaan. Pertama, polarisasi secara internal partai dimana terjadi persaingan antar elit partai untuk menjadi distributor utama alokasi sumber-sumber kekuasaan. Kedua secara eksternal dimana elit antar partai, baik secara individu maupun atas nama institusi kepartaian saling berebut pengaruh untuk menguasai sumber daya kekuasaan yang lebih besar dan lebih luas, dengan menempatkan kandidat mereka pada sumber utama kekuasaan. Sementara motif di balik konflik tiga elit di Pemilihan Umum Walikota Makassar adalah upaya mempertahankan monohirarcial kekuasaan dan poliarki kekuasaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggariani dengan judul *Politik Kekerabatan*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya Masyarakat pedesaan hidup dalam tingkat interaksi antara sesamanya secara intensif. Interaksi anggota masyarakat berbentuk kelompok sosial melahirkan perasaan senasib, sepenanggungan, saling membantu dan tolong menolong secara tulus menimbulkan ikatan kekerabatan yang sangat kuat. Namun sifat manusia yang selalu ingin berkuasa dan menanamkan pengaruhnya berhasrat membagun struktur politik pada segmen yang kecil hingga masyarakat Negara. Relasi politik dan kekerabatan tidak menghalangi munculnya persaingan dalam bentuk oposisi dan koalisi berdasarkan hubungan keluarga dan kepentingan kelompok.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Rusmadi dengan judul *Pola Politik Kekerabatan Sebagai Faktor Terbentuknya Dinasti Politik*. Dalam penelitian ini menghasilkan sikap setuju dan tidak setuju terhadap pemahaman mengenai dinasti politik. Lebih lanjut, sikap pro dan kontra ini berkembang menjadi sebuah perdebatan diskursus dalam refisi Pilkada. Pihak yang pro terhadap dinasti politik mengusulkan dinasti politik tak perlu dilarang, hanya saja adayang harus dibenahi yaitu sistem kaderisasi partai politik di daerah. Sedangkan pihak yang kontra jelas menolak sama sekali adanya praktik dinasti politik dengan cara membatasinya melalui undang-undang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan sering dianggap bertentangan dengan demokrasi, padahal politik kekerabatan di berbagai negara muncul dalam era demokratisasi yang dilahirkan oleh partai-partai politik. Kekerabatan adalah unit- unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang

memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan.⁷ Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya didasarkan karena adanya hubungan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga tetapi karena adanya hubungan darah. Politik kekerabatan lebih mengacu kepada konsep kekerabatan politik ataupun keluarga politik. Politik dinasti/ politik kekerabatan secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi dikalangan kerabat, keluarga sedarah⁸.

Variabel internal, mengacu kepada Morgenstern dan Siavelis merupakan variabel partai yang terdiri dari inklusifitas, sentralisasi/desentralisasi, organisasi partai dan keuangan partai, namun demikian tidak ada kriteria yang baku dalam menganalisis organisasi partai. Keuangan partai merupakan bagian dari organisasi partai, sehingga variabel partai meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan organisasi partai.

Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi morgan terdahulu, kekerabatan mengatur keadaan *socitas* dan yang kedua mengatur *civitas*. Atau menggunakan terminologi yang sering digunakan sekarang ini yang pertama merujuk pada struktur-struktur *respositas* dan kedua merujuk pada dikotomi yang jelas. Dalam kasus ini, ada dikotomi yang jelas yang dikotomi inipun tampil dalam teori marxis dimana masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal.

Jauh dari memandang kekerabatan dan kekuasaan itu sebagai pengertian yang saling meniadakan, antropologi politik telah memperlihatkan ikatan- ikatan kompleks antara dua sistem itu, menganalisisnya, serta mengembangkan teori- teori mengenai hubungan- hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan. Meskipun demikian, tidaklah

⁷ Imron, Ali. *Pola Perkawinan Saibatin*. (Universitas Lampung : Bandar. Lampung, 2005), hlm 27.

⁸ Romadhan, Fandhy Achmad. *Politik Kekerabatan (Studi Kasus Politik Dinasti di Indonesia, 2013)*, hlm 1.

mudah untuk membedakan antara hubungan kekerabatan dan kekuasaan dengan menimbang begitu eratnya hubungan antara keduanya. Dibanyak masyarakat-masyarakat primitif misalnya banyak ditemui adanya kekuasaan yang selalu disandingkan dengan kekerabatan.

Hal ini dapat dilihat dari kriteria masyarakat primitif khususnya dalam keanggotaan suatu komunitas politik. Seperti halnya metode keturunan baik dari garis keturunan patrilineal maupun matrilineal terutama mengkondisikan kewarganegaraan dalam masyarakat-masyarakatnya serta didasarkan atas hubungan-hubungan dan kelompok-kelompok yang disusunnya secara tajam yang akan berbeda dengan kekerabatan dalam pengertian ketatnya. Sedangkan dalam masyarakat segmenter yang menarik sebuah sistem perbudakan domestik, status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian pengucilan dari sebuah garis keturunan dan mengambil bagian sebagai kontrol atas kehidupan masyarakat⁹.

Kekerabatan yang dimaksud adalah unit- unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya didasarkan karena adanya hubungan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga tetapi karena adanya hubungan darah. Selain itu juga menyebutkan bahwa kunci pokok sistem perkawinan bukan karena hubungan darah melainkan juga berasal dari kelompok keturunan (lineage) atau garis keturunan (descent). Antara anggota kelompok keturunan saling berhubungan karena memiliki nenek moyang yang sama dan kelompok kekerabatan ini bisa bersifat patrilineal atau matrilineal. Sistem kekerabatan sekurang-kurangnya, mencakup beberapa unsur antara lain¹⁰ :

- a. Interaksi yang intensif antara warga
- b. Sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku semua warganya
- c. Adanya rasa kepribadian yang disadari semua warga.

⁹ Balander, George, Antropologi Politik (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 65.

¹⁰ Ihromi, Pokok-pokok antropologi budaya. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 59

Berdasarkan unsur tersebut kemudian membedakan 3 kategori kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi sosialnya yaitu¹¹ :

- a. Kelompok kekerabatan berkorporasi yang biasanya menyangkut adanya hak bersama atas dasar sejumlah harta
- b. Kelompok kekerabatan kadang kalayang hanya berkumpul jika adakebutuhan yang diperlukan dan biasanya tidak mempunyai ke-3 unsur diatas.
- c. Kelompok kekerabatan menurut adat, kelompok ini bentuknya sudah semakin besar, sehinggawarganya seringkali sudah tidak saling mengenal. Rasa kepribadian sering kali juga ditemukan oleh tanda-tanda adat tersebut.

Dalam rancangan Undang-undang pemilihan kepala daerah tentang pembatasan politik dinasti juga menuai sikap pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap rancangan undang-undang ini mengemukakan 4 alasan yang *Pertama*:Kemendagri menyebutkan ada 57 kepala daerah membangun dinasti politik lokal, salah satu daerah yang membangun dinasti politik adalah Banten dan Sulawesi Selatan. *Kedua*: melihat pasal 28 J 1945 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa seharusnya kebebasan warga negara perlu dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan lainnya. *Ketiga*: Rancangan Undang-Undang pembatasan kerabat dalam pilkada penting sebab praktik politik kekerabatan atau dinasti yang marak terjadi di sejumlah daerah dinilai merusak demokrasi terutama dalam hak untuk dipilih. *Keempat* : pembatasan kerabat kepala daerah tidak melanggar hak asasi seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Sebab, bila dihadapkan pada hak asasi orang banyak, pembatasan ini akan membuka akses lebih luas kepada orang lain untuk bertarung sebagai calon kepala daerah¹².

Akan tetapi kelompok yang kontra terhadap pengaturan politik dinasti dalam RUU pemilihan kepala daerah dengan alasan pengaturan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa dianggap menghilangkan hak konstitusional

¹¹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 159

¹² Pangi Syarwi, *Pembatasan Politik Dinasti*, (Koran Jakarta 28/2).

warga negara, yang harus dilakukan negara bukan larangan untuk maju menjadi calon kepala daerah namun yang perlu dicegah adalah bagaimana agar tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menggunakan fasilitas negara agar terpilih kembali menjadi kepala daerah. Jangan sampai pesan RUU pembatasan kerabat dalam pilkada menjadi pesan hak konstitusional warga negara jadi seolah-olah dibatasi, yang perlu untuk dilakukan adalah mencegah kekuasaan yang menguntungkan kerabatnya.

Wasisto Raharjo mencoba menelisik gejala terbentuknya dinasti politik yang kian marak ditemukan di Indonesia seperti yang tercatat di catatan Kompas menyebutkan dua temuan analisa yang menyebabkan dinasti politik di Indonesia dapat terbentuk. (1) macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. (2), konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi *status quo* didaerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.¹³

Dari kedua analisa tersebut menghasilkan sikap pro dan kontra terhadap pemahaman dinasti politik. Lebih lanjut, sikap pro dan kontra ini berkembang menjadi sebuah perdebatan diskursus dalam revisi Pilkada. Pihak yang pro terhadap dinasti politik mengusulkan dinasti politik tak perlu dilarang, hanya saja ada yang harus dibenahi yaitu sistem kaderisasi partai politik di daerah. Sedangkan pihak yang kontra jelas-jelas menolak sama sekali adanya praktik dinasti politik dengan cara membatasinya melalui undang-undang munculnya sikap pro dan kontra terhadap dinasti politik ini tidak lepas dari budaya politik yang berkembang di masyarakat daerah.¹⁴ Aksentuasi budaya perpolitikan dalam membahas dinasti politik

¹³ Dalam situs bahasa. kemendiknas.go.id/kbbi. Petahana atau dalam bahasa Inggris ialah incumbent, berasal dari kata "*tahana*", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam politik, adalah pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. istilah "*petahana*" terkadang digunakan untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang sedang memegang jabatan kekuasaan

¹⁴ Afan, Gaffar. *Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 94.

sebenarnya sudah dilakukan dalam berbagai perspektif, contoh neopatrimonialisme, klan politik dan predator politik.

1.6.2 Rekrutmen Politik

1.6.2.1 Pengertian Rekrutmen Politik

Fungsi inti partai politik adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses politik dimana partai berusaha untuk mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan politik. Rekrutmen politik ini dilakukan sebagai sarana representasi dan agregasi kepentingan rakyat, yang dilakukan melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik, sehingga pemerintahan yang dibentuk memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen politik sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya tergantung dari kepengurusan partai.

Menurut Morgenstern dan Siavelis, analisis terhadap rekrutmen politik terdiri atas dua variabel, yaitu variabel hukum dan variabel partai. Sedangkan Norris membagi analisis rekrutmen politik dalam empat level analisis yaitu 1) analisis pada level sistem politik yang terdiri dari sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian; 2) proses rekrutmen yang menganalisis demokrasi internal partai; 3) analisis terhadap para kandidat; dan 4) level analisis pada selektor.

Menurut Czudnowski dalam Sigit Pamungkas¹⁵ rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Lebih jauh dari Gabriel Almond (Lily Romli, 2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen

¹⁵ Pamungkas, Sigit, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2011), hlm. 91

politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Dalam konteks di Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses dimana partai politik memilih dan mengangkat tokoh-tokoh politik yang kemudian mengenalkan mereka pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik dan berpartisipasi dalam proses politik. tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat, namun tidak melupakan bahwa aktor-aktor yang berkecimpung didalamnya harus memiliki kualitas dan serta melalui proses yang disarankan pada latar belakang yang jelas.

1.6.2.2 Tahap-tahap dalam Rekrutmen

Menurut Syamsuddin Haris¹⁶ (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup :

- a. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang

¹⁶ Syamsudin Haris, *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai*, (Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka, 2005), hlm. 8

- b. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijang. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
- c. Penetapan calon berikut nomer urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Perlakuan parta politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian parta politik. hal tersebut melhairkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. biasanya cara parta melakukan tahapan-tahapana dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

1.6.2.3 Model Rekrutmen Politik

Czudnoski menurut Fadillah Putra¹⁷, mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:

- a. Rekrutmen terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

¹⁷ Putra, Fadillah. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan publik*. (Jakarta: Pustaka. Pelajar. 2003), hlm. 103

b. Rekrutmen tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan dari pola yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya dalam pelaksanaan pola-pola tersebutpun biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya. Menurut Hasibuan¹⁸ cara rekrutmen yang dilakukan partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

- a. Metode Ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasar pada pedoman tertentu yang berisi standar-standar tertentu.
- b. Metode Non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Dapatlah dikatakan bahwa disetiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lain, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan

¹⁸ Hasibuan, Malayu. *Manajemen sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 52

kalaupun mereka berasal dari kelas bawah tapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

1.6.2.4 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam rekrutmen politik

Sedangkan menurut Leijennar dan Niemaler¹⁹ ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni sebagai berikut :

- a. Karakteristik kemampuan yang meliputi : pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias yang tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu-isu politik.
- b. Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan.
- c. Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas ditingkat lokal, dukungan massa partai politik dan organisasi masyarakat.
- d. Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan beragama, kepedulian, dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga.
- e. Pengalaman politik meliputi: pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai.

Berdasarkan tentang pedapat diatas mengenai tahapan dan pola rekrutmen politik, dapat disimpulkan jika proses rekrutmen bukan hanya sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-nama orang atau kandidat. Tapi lebih daripada itu adalah sejauh mana kandidat yang dipromosikan tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban tugas partai dan amanah para rakyat pemilih.

¹⁹ Norris, Pippa, at all. *Framing Terrorism: The News Media The Government, and The Public*. (New York: Routledge, 1995), hlm 77

1.6.3 Partai Politik

1.6.3.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik pertama lahir di negara - negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah²⁰. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik.

Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik. Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan²¹.

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip dalam Miriam Budiardjo²², adalah sebagai berikut. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.²³

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (akarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 7

²¹ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama, 2008), hlm. 403.

²² *Ibid*,,,, hlm, 403

²³ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama, 2008), hlm. 403.

Kemudian Sigmund Neumann²⁴ mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktifitas - aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut Ramlan Surbakti²⁵ menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy,1998: 11). Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan

²⁴ *Ibid*,,,,,, hlm, 404.

²⁵ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), hlm. 116

tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

1.6.3.2 Fungsi Partai Politik

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tak dapat dipisahkan. Dalton dan Martin P. Wattenberg²⁶ membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yakni sebagai berikut:

a. Fungsi partai di elektorat

Pada bagaian fungsi partai ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai dielektorat yaitu:

- 1) Menyederhanakan pemilihan bagi pemilih.
- 2) Pendidikan warga negara.
- 3) Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas.
- 4) Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.

b. Fungsi partai sebagai organisasi

Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi partai politik sebagai organisasi politim ataupun proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini terdapat empat fungsi yakni:

- 1) Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik.
- 2) Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi.
- 3) Pengartikulasian kepentingan politik.
- 4) Pengagresasian kepentingan politik.

²⁶ Pamungkas, Sigit, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2011), hlm. 15-20

c. Fungsi partai dipemerintahan

Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan dipemerintah. Pada bagaian initerdapat tujuh fungsi yakni :

- 1) Menciptakan mayoritas pemerintahan.
- 2) Pengorganisasian pemerintah.
- 3) Implementasi tuntutan kebijakan.
- 4) Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi.
- 5) Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah.
- 6) Kontrol administrasi terhadap pemerintah.
- 7) Memperkuat stabilitas pemerintahan.

Dalam konteks partai politik di Indonesian undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 11 dijelaskan bahwa fungsi partai politik adalag sebagai berikut:

- a. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Sarana yang menciptakan iklim yang kodusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa negara untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Sarana partisipasi politik bagi warga negara Indonesia.
- e. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

1.6.4 Pemilu Legislatif

Pemilu merupakan mekanisme memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang akan mengatasnamakan rakyat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan sudah lama dikenal, yang diperkirakan pertama kali diterapkan di Yunani kuno, sekitar 2500 tahun lalu²⁷.

Indonesia merupakan negara menjunjung tinggi demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintahan baik itu anggota legislatif ataupun presiden akan lewat cara pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.²⁸

Pemilihan legislatif di Indonesia telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan yang ke lima yang akan terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2014 untuk anggota DPR dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan permajemuk yang disipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih

²⁷ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yay. Obor Indonesia, 2001), hlm.9

²⁸ Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. 2005. Hal 1-2

dipemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR). Kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri didaerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah mencoblos dengan mencoblos satu lubang pada calon anggota legislatif yang dipilih atau digambar partai politik yang anda pilih.

Dewan perwakilan daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota dewan perwakilan daerah (DPD) memakai sistem single non transferable vote. Saat pemilu legislatif memakai sistem ini, akan diberi satu surat yang berisi semua calon independen yang telah mencalonkan diri di Provinsi dimana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya empat nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

Pemilihan anggota dewan rakyat daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak yang ada di provinsi tersebut. Tentunya dalam memilih anggota DPR,DPD,DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang 8/2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari komisi pemilihan umum (KPU) yang telah diatur oleh undang-undang nomor 15/2011. Selain KPU lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pemilu termasuk pemilihan legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu adapula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Adapun tujuan pemilihan umum menurut Prihatmoko²⁹ pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (publik policy).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat pada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dalam negara keastuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

²⁹ Prihatmoko. Joko. *Mendemokraskan Pemilu*. (Yogyakarta. Pustaka, 2008), hlm. 19

Sedangkan fungsi pemilihan umum menurut C.S.Kansil dan Christine S.T Kansil fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-undang dasar 1945.

1.7 Definisi Konseptual

1. Politik Kekerabatan

Politik dinasti/ politik kekerabatan secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi dikalangan kerabat, keluarga sedarah

2. Rekrutmen Politik

Proses melalui mana partai politik memilih dan mengangkat tokoh-tokoh politik yang kemudian mengenalkan mereka pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik dan berpartisipasi dalam proses politik

3. Partai Politik

Partai politik merupakan kumpulan individu yang mempunyai tujuan, visi, dan misi yang sama untuk mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan.

4. Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif adalah pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang

nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel ³⁰(Singarimbun dan Effendi, 1989: 23). Dengan kata lain definisi operasional ini akan memberikan gambaran mengenai variabel apa saja yang dapat digunakan untuk membantu sebuah penelitian.

Menurut Syamsuddin Haris, Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup :

- A. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang
- B. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
- C. Penetapan calon berikut nomer urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

³⁰ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: LP3ES. 1989), hlm 23.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan judulnya penelitian ini menganalisis proses politik kekerabatan yang memperoleh jabatan politik Golkar pertama kalinya pada pemilu di Sulawesi Selatan. Moleong³¹ mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari beberapa definisi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian kualitatif dimaksudkan suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Menggunakan deskriptif analisis diharapkan penelitian ini dapat menggali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan partai Golkar dalam mengikuti Pilkada Daerah serta kebijakan-kebijakannya. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini mampu mengungkapkan fakta di lapangan secara lebih dalam dan lebih intensif pada daerah atau kabupaten yang dijadikan lokasi pengumpulan data secara primer dan sekunder.

Pengumpulan data secara primer akan dilakukan dengan cara wawancara para informasi dan observasi oleh peneliti sedangkan pengumpulan data secara sekunder akan dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen, arsip dari lembaga yang terkait, sehingga pada akhirnya pengumpulan data tersebut akan mendeskripsikan mengenai proses politik kekerabatan yang memperoleh jabatan politik Golkar pertama kalinya pada pemilu di Sulawesi Selatan.

³¹ Moleong, J Lexy, Prof. Dr. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, 2009), hlm. 6

1.9.2 Obyek Penelitian

Moleong menyatakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Partai Golkar DPD Tingkat I di Sulawesi Selatan.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu ³².

Sedangkan menurut Supriyati³³ adalah cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan atau kebutuhan. wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.

Wawancara mendalam merupakan wawancara pribadi, langsung, dan tidak terstruktur dengan seorang subjek yang diselidiki oleh pewawancara yang sangat terampil untuk menemukan latar belakang motivasi, keyakinan, sikap, dan perasaan subjek terhadap satu topik.

Wawancara yaitu mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses rekrutmen politik Partai Golkar DPD I dan Fenomena politik kekerabatan pada pemilihan legislatif 2014 di Sulawesi Selatan. Adapun yang ingin diwawancarai adalah pengurus partai politik Golkar DPD Tingkat I di Sulawesi

³² Moleong, J Lexy, Prof. Dr. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, 2009), hlm. 186.

³³ Supriyati, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Labkat press, 2011), hlm. 48..

Selatan, anggota DPRD Golkar, dan tokoh masyarakat. Namun, pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat.

b. Dokumentasi

Menurut Atikunto yang disebut dengan dokumen adalah barang-barang tertulis³⁴. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Dokumen dalam hal ini berupa data mengenai politik kekerabatan di Sulawesi Selatan, mengenai perolehan suara pada saat pemilu 2014, data mengenai sistem rekrutmen Partai Golkar, serta data-data dokumen yang berasal dari penelitian sejenis serta berita-berita dari media massa.

1.9.4 Teknik Analisa Data

Tahap selanjutnya setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Menurut Meleong analisa data adalah menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar³⁵. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 201.

³⁵ Moleong, J Lexy, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, 2009), hlm. 103.

catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan³⁶.

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan³⁷.

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, foto, gambar bagan, table dengan tujuan mempermudah penyampaian makna penelitian.

³⁶ Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi.. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm 16.

³⁷ *Ibid.,*, hlm. 17.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.